

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur:

- Amir, Chaerul. 2014. *“Kejaksanaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis”*. Jakarta: Deleader.
- Bemmelen, Van. 2003. *“Strafvordering Leerboek van Het Nederlandsch Procesrecht (undang-undang di Belanda yang memuat Hukum Acara Pidana)”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, W. J. S. 2003. *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nazir, Moh. 2005. *“Metodologi Penelitian”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hudson, T. 2007. *“Using nutrition to review primary dysmenorrhea. Alternative & Complementary Therapies”*. Marry Ann Liebert, Inc.
- Muliawan, Jasa. 2014. *“Metodologi Penelitian Pendidikan”*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Suryabrata. 2006. *“Metodologi Penelitian”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A. T. Mappiare, Andi. 2006. *“Kamus Istilah Konseling dan Terapi”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Usman, Nurdin. 2002. *“Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”*. Jakarta: Grasindo.
- Julitriarsa, Djati dan Suprihanto, Jhon. 2008. *“Manajemen Umum Sebuah Pengantar”*. Yogyakarta: BPF. Edisi Pertama.
- Anggowo. 2008. *“Actuating Dalam Pendidikan”*. Bandung: Rosdakarya Press.
- Torang, Syamsir. 2014. *“Organisasi dan Manajemen”*. Bandung: Alfabeta.
- Indriati Farida Maria, S. 2007. *“Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar Dan Pembentukannya”*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harahap, Yahya M. 2012. *“Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan”*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Kedua.
- Waluyo, Bambang. 2008. *“Penelitian Hukum Dalam Praktik”*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soekanto, Soerjono. 2006. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: UI Press.
- Soejono dan Abdurrahman H. 2003. *"Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin. 2014. *"Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2001. *"Metodologi Penelitian"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suratman dan Dillah H, Philip. 2013. *"Metode Penelitian Hukum"*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Moleong J, Lexy. 2001. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- H. S. Salim dan Septiana, Erlies. 2013. *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad H, Rusli. 2015. *"Hukum Acara Pidana Kontemporer"*. Bandung:, PT. Citra Aditya bakti.
- Harahap Yahya, M. 2007. *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Cetakan 2"*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2012. *"KUHP Lengkap"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1983. *"Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia"*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramelan. 2006. *"Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)"*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Lumintang, P.A.F. dan Lumintang, Theo. 2010. *"Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Fahri. 30 Maret 2017. *"Sistematika Pemberantasan Korupsi"*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema "Pemetaan Korupsi di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif: Strategi Pencegahan dan Penindakannya". diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Arif Nawawi, Barda. 2010. *"Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi"*. Semarang: Rajawali Press.
- Wulandari Ayu, Trisna. 2009. *"Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Pra Peradilan Menurut KUHAP dengan Sistem Recht"*

Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana Belanda". Skripsi S-1: Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Salim dan Septiana, Erlies. 2014. *"Perbandingan Hukum Perdata"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wartiningsih, Winarwati, Indien dan Yulianti. Rina. 2019. *"Perbandingan Hukum"*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Muhammad, Rusli. 2011. *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*. Yogyakarta: UII Press.

Effendi, Tolib. 2018. *"Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara"*. Surabaya: Pustaka Yustisia.

Marpaung, Laden. 2009. *"Proses Penanganan Perkara Pidana"*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyono, R. 2005. *"Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2001. *"Masa Kolonial Sampai Era Reformasi"*. Malang: Dinamika Hukum Universitas Islam Malang.

Priambada, Sura Bintara. 2014. *"Eksistensi KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi"*. Proseding Seminar Unsa: Universitas Surakarta Jawa Tengah.

Sutarto, Suryono dalam Poerwadarminta. 2004. *"Hukum Acara Pidana Jilid I"*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Garner A. Bryan. 2004. *"Black's Law Dictionary"*. Thomson: St. Paul.

Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke II. Cikutra Baru. Bandung.

B. Jurnal Ilmiah:

Faris Naufal, Afif dan Ginting, Rehnalemken. *"Legalitas Dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019"*. Jurnal Recidive. Volume 9. Nomor 1 Januari-April 2020.

Arif Christiono Soebroto. *"Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas"*. Jurnal Workshop. Diakses dari https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan

di Kementerian PPN bappenas.pdf. Diunduh pada 08 Juni 2022, Pukul 20.39 WIB.

Lasmadi, Sahuri. “*Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6. Nomor 2 Tahun 2015.

Akbar, Muhammad Rizal. “*Kebijakan KPK dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan*”. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2016.

Asyari, Fatimah. “*Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum*”. Jurnal Legalitas. Volume 2. Nomor 1 Juni 2017.

Widya Parameswari R, Anak Agung Istri Ari A. D. “*Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. 2019. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47816>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2022, Pukul 10.56 WIB.

Wattie Johaness, Andre. “*Sifat Eksepsional Tertangkap Tangan dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana*”. Lex Crimen. Volume IV. Nomor 5 Juli 2015.

Lasmadi, Sahuri. “*Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”. Forum Akademika. Volume 24. September 2013.

M, R, Saripti. “*Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Ilmu Hukum Unsrat, Volume 22, Nomor 7 Tahun 2016, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/81164-IDjaksa-selaku-penyidik-tindak-pidana-koru.pdf>., Diunduh pada tanggal 16 Juni 2022, Pukul 20.59.

Pilok Ferianti, Didit. “*Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*”. Lex Crimen. Volume II. Nomor 4 Agustus 2013.

Fitria. “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. Jurnal Nestor Magister Hukum. Volume 2. Nomor 2 November 2012.

Mohede, Noldy. “*Tugas dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”. Jurnal. Volume XX. Nomor 1 Januari 2012.

Oktavianto, Rizky dan Abheseka Rahadiri, Mustika Norin. “*Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK*”. Jurnal Antikorupsi Integritas. Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Universitas Gadjah Mada. 2019.

Nurtjahjo, Hendra. “*Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia*”. Tinjauan Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 35. Nomor 3. 2005.

Wibowo, Ari. “*Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”. Istinbath: Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Volume 12. Nomor 1. 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014, mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

_____, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Media Online:

Haryanto, Alexander. 04 Maret 2021. “*Apa Itu OTT KPK: Arti, Contoh dan Dasar Hukumnya?*”. Diakses dari <https://tirto.id/apa-itu-ott-kpk-arti>

contoh-dan-dasar hukumnya-gaQJ. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022. Pukul 22.10 WIB.

Hayati, Rina. 27 September 2021. “*Pengertian Penelitian Komparatif, Ciri, Macam, Tujuan, Cara Menulis, dan Contohnya*”. Diakses dari <https://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif/>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2022. Pukul 15.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/operasi%20tangkap%20tangan>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2022. Pukul 10.42 WIB.

Vebriyanto, Widian. 24 Agustus 2017. “*Fahri Hamzah: Istilah OTT kacaukan Kaidah Bahasa Dan Hukum*”. Diakses dari <https://politik.rmol.id/read/2017/08/24/304323/fahri-hamzah-istilah-ott-kpk-kacaukan-kaidah-bahasa-dan-hukum>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2022, Pukul 11.35 WIB.

NS, Nursal Muhammad. 06 November 2015 (Update 17 April 2020). “*Silent Operation KPK: OTT Vs Penyadapan*”. Diakses dari <https://www.negarahukum.com/silent-operation-kpk-ott-vs-penyadapan.html>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2022. Pukul 11.51 WIB.

Penjelasan Laica Marzuki sebagai Ahli, yang disampaikan di hadapan Hakim tunggal I Wayan Karya dalam Sidang Praperadilan Irman Gusman melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 27 Oktober 2016. *Harian Haluan*. 2 Februari 2017. “*Laica Marzuki Jadi Saksi Ahli IG*”, 28 Oktober 2016. Diakses dari <http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-ottkacaukan-hukum-acara>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2022. Pukul 14.12 WIB.

Kusuma Febriyanti, Edward. 30 Januari 2017. “*Memahami Istilah Operasi Tangkap Tangan di Kasus Patrialis Akbar*”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3409476/memahami-istilah-operasi-tangkaptangan-di-kasus-patrialis-akbar>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2022, Pukul 14.20 WIB.

“*Penyadapan dan OTT KPK Sah dan Berdasarkan Undang-Undang*”. Diakses dari <https://www.ramadhianadibroto.com/penyadapan-dan-ott-kpk-sahdan-berdasarkan-undang-undang/>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2022. Pukul 22.02 WIB.

Hiariej OS, Eddy. 13 Oktober 2017. “*Memahami Analogi dan Ihwal OTT KPK*”, Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1247918/18/memahami-analogi->

dan-ihwal-ottkpk-1507857622/, Diakses pada tanggal 16 Juni 2022, Pukul 22.13 WIB.

Sidin, Irmanputra. “*OTT KPK Penting untuk Bersihkan Dunia Penegak Hukum dari Praktik Suap*”. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/08/pakar-hukum-ott-kpk-pentinguntuk-bersihkan-dunia-penegak-hukumdari-praktik-suap>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2022. Pukul 22.23 WIB.

“*OTT KPK Ilegal: Ini Tanggapan Balik Prof. Romli untuk Prof. Eddy Hiariej*”. Diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/romli-atmasasmita-dan-eddy-hiariej.html>. OTT KPK Ilegal: Ini Tanggapan Balik Prof. Romli untuk Prof. Eddy Hiariej. Diakses pada tanggal 16 Juni 2022. Pukul 22.35 WIB.

“*Yusril: KPK Genit seperti Toko Kelontong*”. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2016/11/15/337/1541923/yusril-kpk-genit-sepertitoko-kelontong>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2022. Pukul 22.43 WIB.

Michico Riris, Nathania. 27 Oktober 2016. “*Saksi Ahli Irman Gusman Sebut Istilah OTT Kekacauan Hukum Acara*”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3331225/saksi-ahli-irman-gusman-sebut-istilah-ott-kacauan-hukum-acara>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2022. Pukul 22.54 WIB.

_____. Diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/jejak>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2022. Pukul 09.56 WIB.

Safitri, Eva. 7 Desember 2021. “*UU Kejaksaan: Jaksa Berhak Menyadap!*”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5844579/uu-kejaksaan-jaksa-berhak-menyadap>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022. Pukul 12.56 WIB.

Al Ayyubi, Sholahuddin. 7 Desember 2021. “*UU Kejaksaan Disahkan, Jaksa Kini Bisa Melakukan Penyadapan*”. Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20211207/16/1475067/uu-kejaksaan-disahkan-jaksa-kini-bisa-melakukan-penyadapan>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 13.22 WIB.

Wahuni, Willa. 29 April 2022. “*Mengenal Operasi Tangkap Tangan KPK*”. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-operasi-tangkap-tangan-kpk-lt626ac7a171949?page=3>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022. Pukul 09.36 WIB.

_____. 13 Januari 2020. “*Berpotensi Masuk Praperadilan, Prof. Dr. Hibnu Nugroho Sarankan KPK Segera Evaluasi OTT*”. Diakses dari

<https://www.edisi.co.id/nasional/pr-97920023/berpotensi-masuk-praperadilan-prof-dr-hibnu-nugroho-sarankan-kpk-segera-evaluasi-ott>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022. Pukul 09.38 WIB.

_____. 18 April 2007. “*KPK, POLRI, dan Menkominfo Bahas PP Penyadapan*”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-769257/kpk-polri-dan-menkominfo-bahas-pp-penyadapan>. Diakses pada tanggal 03 November 2022. Pukul 02.35 WIB.

E. Narasumber Wawancara:

Ciprian Caesar. Penyidik dari Direktorat Penyidikan JAMPIDSUS di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta. 28 September 2022.

Budi Sokmo Wibowo. Penyidik dari Direktorat Penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Jakarta. 06 Oktober 2022.

